



Judul : Kenaikan Tunjangan DPR Cair  
Tanggal : Minggu, 18 Oktober 2015  
Surat Kabar : Republika  
Halaman : 3

## Kenaikan Tunjangan DPR Cair

● AGUS RAHARJO

JAKARTA — Kenaikan tunjangan anggota DPR RI mulai cair Oktober ini. Beragam sikap ditunjukkan fraksi-fraksi dewan.

Fraksi Partai Hanura di DPR RI menegaskan tetap konsisten untuk menolak kenaikan tunjangan anggota dewan. Namun, sikap resmi dari fraksi belum dikeluarkan soal peruntukan kenaikan tunjangan yang sudah telanjur cair mulai bulan Oktober ini.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI punya pertimbangan lain. Fraksi ini mempertimbangkan menyalurkan kenaikan tunjangan dewan untuk korban asap di Sumatera dan Kalimantan.

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menegaskan meski sudah cair, fraksinya konsisten menolak kenaikan tunjangan sekitar Rp 6 juta tiap anggota tersebut. Sejak awal, kata dia, Hanura menolak kenaikan tunjangan yang sudah telanjur dimasukkan dalam anggaran oleh pemerintah ini. "Yang jelas kita akan konsisten untuk menolak kenaikan tunjangan," kata Dadang kepada *Republika* Sabtu (17/10).

Anggota Komisi X DPR RI ini menambahkan, saat ini fraksi menunggu keputusan partai terkait tunjangan yang sudah turun. Beberapa anggota DPR dari fraksi lain berniat untuk mengembalikan kenaikan tunjangan ke negara melalui Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sementara itu, kata Dadang, fraksi akan menunggu keputusan partai. Apakah kenaikan tunjangan itu akan dikembalikan ke negara, atau digunakan untuk hal lain. "Kita masih menunggu perintah partai," tegas dia.

Perihal kenaikan tunjangan para anggota dewan ini pernah hangat beberapa bulan lalu. Beberapa fraksi, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PPP, secara tegas menolak karena selain tak ada urgensinya, mereka menilai kenaikan itu tidak tepat di saat rakyat tengah mengalami kesulitan ekonomi. Beberapa waktu kemudian, seluruh fraksi pun ramai-ramai menolak kenaikan itu.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan, fraksinya lebih mempertimbangkan mengembalikan langsung kenaikan tunjangan pada masyarakat dibanding kepada negara.

PKS menilai pengembalian kenaikan tunjangan anggota dewan akan sangat membantu masyarakat. Sebab, harga kebutuhan pokok naik, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana, serta perlambatan ekonomi nasional akibat guncangan ekonomi global.

"Saat ini korban asap sangat membutuhkan, ketimbang dikembalikan hanya *show* saja," kata Jazuli kepada *Republika*, Sabtu (17/10).

Jazuli menambahkan, saat ini kebijakan menyalurkan kenaikan tunjangan untuk membantu korban asap belum menjadi keputusan fraksi. Dalam waktu dekat, kata dia, Fraksi PKS akan membahas pengembalian kenaikan tunjangan itu ke masyarakat. Terlebih, partai juga sudah mengindikasikan kebijakan tersebut.

Menurut Jazuli, hanya sebagian kenaikan tunjangan yang akan diperuntukkan membantu korban asap sampai kasus asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan ini mereda. Selanjutnya, PKS akan mempertimbangkan untuk menyalurkan kenaikan tunjangan sekitar Rp 6 juta tiap anggota ini menjadi kegiatan riil di masyarakat. ■ ed: nina chairani